

Kekerasan Masih Membayangi Perempuan di Tanah Air

JAKARTA, KOMPAS — Kendati sudah banyak kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah terkait perlindungan perempuan, berbagai kejahatan, terutama kekerasan dalam berbagai bentuk, terus terjadi pada perempuan. Payung hukum yang tersedia, termasuk sanksi pidana yang diperberat, belum cukup membuat pelaku jera atau mencegah munculnya pelaku baru.

Pola pikir dan sikap masya-

rakat, yang belum banyak berubah serta masih menganggap dan menempatkan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki, membuat perempuan terus-menerus menjadi obyek kekerasan. Sementara pemahaman dan kapasitas perempuan untuk melakukan perlawanan terhadap berbagai kekerasan juga masih sangat rendah.

Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2016 yang dilakukan Badan Pusat Sta-

tistik (BPS) atas permintaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan, satu dari tiga perempuan Indonesia berusia 15-64 tahun atau sekitar 28 juta perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual oleh pasangan dan selain pasangannya. Dalam satu tahun terakhir, 8,2 juta perempuan atau 9,4 persen mengalami kekerasan fisik dan seksual.

Catatan Komisi Nasional Anti-

kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2017 menunjukkan terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 245.548 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani 359 pengadilan agama dan 13.602 kasus yang ditangani 233 lembaga mitra layanan di 34 provinsi.

Ratna Batara Munti, pengurus Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indo-

nesia untuk Keadilan, mengatakan, kekerasan berbasis gender terus terjadi karena berbagai faktor, antara lain ketimpangan gender, budaya patriarki, dan lemahnya intervensi negara.

"Padahal, Indonesia sejak 1984 meratifikasi Konvensi CEDAW (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-2)

Kekerasan Masih

(Sambungan dari halaman 1)

1984, tetapi hingga kini belum diimplementasikan dengan baik," ujar Ratna, di Jakarta, Selasa (6/3).

Dalam memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret, kemarin sejumlah aktivis dari berbagai organisasi/lembaga yang peduli pada perempuan menyerukan perlakuan kekerasan terhadap perempuan.

Selain Ratna, ada pula Wahyu Susilo (Direktur Eksekutif Migrant Care), Misiyah (Direktur Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan), Siti Musdah Mulia (Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace), Valentina Sagala (Institut Perempuan), Ruby Kholifah (Direktur Asian Muslim Action Network Indonesia), dan Asriyanti (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia).

Mereka menyerukan agar negara, melalui pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, lebih serius dan fokus menggerakkan kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah agar bersinergi, melalui program-program dan anggaran yang berbasis gender.

Untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, perlu upaya dari hulu ke hilir, dari akar ke cabang, menghapus ketimpangan gender di masyarakat. Pendidikan tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender perlu diperkuat, demikian juga penegakan hukum atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

"Hampir 20 tahun reformasi, isu perempuan merupakan masalah yang tetap akut meski kita akui telah ada beberapa perlindungan hukum di Indonesia," ujar Misiyah.

Kekerasan yang dialami perempuan sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga psikis, dan terus terjadi di berbagai ranah privat dan publik. Modus kejahatan pun semakin canggih seiring perkembangan teknologi yang memberi kemudahan dalam mengakses internet. Korbannya mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, hingga lanjut usia.

Berupaya keras

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise menyatakan, pemerintah terus berusaha melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui berbagai program dan mendorong masyarakat untuk bersama-sama pemerintah melindungi perempuan.

"Syukurlah masyarakat sudah semakin sadar melapor, jadi terlihat banyak laporan yang masuk dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," kata Yohana.

Sylvana Apituley, Staf Ahli Utama Kedeputusan V Kantor Staf Presiden, mengatakan, isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak saat ini menjadi agenda prioritas pemerintah. Berdasarkan amanat konstitusi dan Nawacita, pemerintah selama tiga tahun berupaya meningkatkan kualitas hidup manusia, perempuan, dan anak. (SON)